KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus KPK Membabi Buta, Masinton Dicopot
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Pansus KPK Membabi Buta, Masinton Dicopot

JAKARTA - Manuver Pansus Hak Angket KPK DPR RI kian membabi buta jelang masa kerja mereka habis pada 28 September mendatang. Tak direspon untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi, kini mereka menuduh Ketua KPK, Agus Raharjo terlibat korupsi pegadaan alat berat pada 2015 silam. Melihat kondisi tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah menahan diri guna mengamankan suara pada 2019 nanti.

"Pansus Angket kian membabi buta," ungkap Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kepada wartawan, Kamis (21/9). Menurut Lucius, tudingan Pansus Angket kepada Ketua KPK, Agus Rahardjo sebagai upaya untuk merusak citra personal dan lembaga antirasuah ▩

► *Baca **Pansus**...Hal 7*

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Pansus KPK Membabi Buta, Masinton Dicopot

Sambungan dari hal 1

"Sikap yang paling tepat bagi publik saya kira memang harus meragukan tuduhan Pansus Angket. Saya kira belum satu pun alasan untuk percaya dengan informasi pansus terkait tuduhan mereka terkait Agus Raharjo," kata Lucius.

Lucius menilai, Pansus Angket seolah tidak mau kehabisan peluru menjelang masa berakhir tugasnya pada 28 September 2017. Belum tuntas dengan tudingan terdahulu, yakni mengenai tudingan keterlibatan Agus di kasus KTP elektronik, muncul tuduhan baru soal pengadaan alat berat. Kasus ini pun disiarkan dengan seolah-olah sudah pasti benar oleh anggota Pansus Angket. Jika muncul pertanyaan verifikasi, jawaban normatif yang muncul dari Pansus Angket hanya 'bukti valid', 'sumber terpercaya' dan lainnya.

Padahal, menurut Lucius, dugaan keterlibatan Agus di proyek KTP elektronik yang dimunculkan Pansus, sampai sekarang tidak semakin terang. Sebaliknya, kasus ini mulai dilupakan oleh DPR umumnya dan pansus secara khusus.

Menjelang berakhirnya kerja Pansus Angket KPK, tambah Lucius, tekanan berat tentu akan dialami pansus. Tekanan itu adalah untuk memastikan tuduhan-tuduhan yang selama ini disampaikan bisa menjadi bukti pendukung yang valid sebagai pendukung rekomendasi yang akan dihasilkan pansus. Saat itu, pansus harus bisa membayangkan respons publik atas hasil kerja mereka.

"Apakah mereka akan dicatat sebagai pahlawan yang mengikuti pesan presiden untuk memperkuat KPK atau hanya sekelompok yang bergosip dan kebetulan menjadi wakil rakyat," ujar Lucius.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, 'serangan' Pansus Angket terhadap Ketua KPK, Agus Rahardjo, telah membuktikan agenda dan tujuan utama dibentuknya Pansus Angket.

"Serangan itu sekaligus memperkuat fakta, memang Pansus ini bekerja untuk melakukan gangguan-gangguan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," terangnya kepada wartawan, Kamis (21/9).

Menurut Dahnil, gangguan terhadap KPK akan semakin gencar apabila KPK sedang menangani kasus besar yang melibatkan banyak politisi berpengaruh. Misalnya, saat ini KPK tengah mengusut korupsi e-KTP. Proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut diduga melibatkan banyak anggota DPR RI. Salah satunya, Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Pansus bagi saya terang menjadi alat untuk menyelamatkan teman sejawat," kata Dahnil.

Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan membantah hal diatas. Dia mengatakan, Pansus Angket tidak bersikap demikian. Menurutnya, Pansus Angket berkerja sesuai koridor yang berlaku. Oleh sebeb itu, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada KPK, lantaran lembaga antirasuah itu tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dalam rapat pansus di Gedung DPR, Senayan, pada Rabu, 20 September 2017 kemarin.

Dia menerangkan, pansus adalah lembaga yang terlegitimasi. Karena itu sangat prihatin dengan sikap KPK yang masih meragukan keabsahan hukum munculnya pansus ini. "Siapapun yang dimintakan hadir oleh DPR sebagai wujud daulat rakyat, harusnya menghormati itu. Harusnya memanfaatkan momen-momen itu untuk melakukan klarifikasi," imbuhnya.

Sementara, pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, sikap yang dilayangkan oleh politisi PDIP yang duduk di Pansus Angket tidak akan keras seperti sebelumnya. Ia menilai, partai berlambang banteng moncong putih itu mulai menahan diri. "PDIP mulai ambill sikap menahan diri. Tujuannya untuk menjaga perolehan suara pada pemilu 2019 mendatang," tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Hal itu, sambung Ray, terbukti dengan merotasi dua kali kadernya yang ada di Pansus Angket. Ia menilai ini buntut dari kerapnya kedua orang itu melayangkan kritik dan sikap yang keras terhadap KPK.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto membenarkan adanya surat perubahan penugasan pimpinan pansus. "Iya sementara diganti sebagai pimpinan angket oleh Pak Eddy Kusuma," kata Bambang, kemarin.

Dia membeberkan, Fraksi PDIP kembali merotasi perwakilan fraksi di Pansus Angket. Posisi Wakil Ketua Pansus Angket, Masinton Pasaribu kini digantikan Eddy Kusuma Wijaya.

Namun, Bambang membantah jika rotasi itu dilakukan lantaran kinerja Masinton dalam Pansus Angket yang dinilai terlalu vokal mengkritisi KPK. Menurut Bambang, rotasi posisi pimpinan adalah hal yang biasa dilakukan fraksi PDIP, sebagaimana saat fraksi merotasi posisi pimpinan Pansus Angket sebelumnya dari Risa Mariska menjadi Masinton Pasaribu beberapa waktu lalu.

Masinton Pasaribu, selaku pihak yang dirotasi heran dengan ramainya pemberitaan mengenai pencopotannya dari Wakil Ketua Pansus Angket.

Menurut dia, pencopotan itu bukanlah hal yang luar biasa. "Mungkin karena saya yang diganti, jadi berita. Sebenarnya biasa itu," kata Masinton ketika dikonfirmasi, Kamis (21/9).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, pencopotan itu bukan karena dirinya selalu vokal mengkritisi KPK dalam rapat-rapat pansus. Masinton juga beranggapan dia tidak 'overacting' saat duduk di kursi Wakil Ketua Pansus Angket.

"Ketika saya masih anggota pun, suara saya biasa, yang saya sampaikan juga biasa. Ketika saya jadi pimpinan pansus juga saya sampaikan biasa," kilahnya.

Masinton menegaskan, pergantian ini hanya rotasi murni atau penyegaran internal organisasi. Dia menerangkan, rotasi-rotasi ini bukan karena ada masalah tertentu. "Ketika saya menggantikan Bu Risa Mariska juga bukan karena ada masalah," kata Masinton.

Diketahui, Pansus Angket melakukan konfrensi pers di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (20/9). Anggota Pansus Hak Angket KPK PR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015.

"Kami temukan indikasi penyimpangan di internal LKPP yang saat itu pimpinannya adalah Agus Rahardjo," ujar Arteria.

Menurut Arteria, proyek yang bekerja sama dengan PT Dormauli tersebut senilai Rp 36,1 miliar. Pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek, menurut Arteria, diduga melakukan rekayasa dalam proses pengadaan.

Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan. Berdasarkan laporan yang diterima Pansus, pada saat pengadaan barang tersebut dilakukan, ada pihak-pihak di internal LKPP yang ikut terlibat dalam praktik korupsi.

"Kami juga menemukan fakta ada pihak yang dalam hal ini pimpinan LKPP diduga kuat memerintahkan direktur pengembangan sistem katalog LKPP untuk melaksanakan e-catalogue. Jadi ada transaksi dulu baru rekayasa," kata Arteria. **(aen)**